

**PENGUKURAN PERFORMA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI (IPDN) JATINANGOR BERDASARKAN KINERJA
KEUANGAN DAN ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN
BELANJA PERIODE 2012-2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Manajemen

NOVIA AULIA SUPENDI

NPM : A10150315



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
BANDUNG**

2019

**PENGUKURAN PERFORMA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI (IPDN) JATINANGOR BERDASARKAN KINERJA
KEUANGAN DAN ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN
BELANJA PERIODE 2012-2017**

**NOVIA AULIA SUPENDI
NPM : A10150315**

Bandung, 21 Januari 2019

Pembimbing

(Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA)

Mengetahui

Ketua STIE Ekuitas

Ketua Program Studi
S1 Manajemen

(Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., MSc.,CSP.)

(Dr. Iim Hilman, SE., MM.)

Tanggung jawab yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN

PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dijelaskan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 21 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

(Novia Aulia Supendi)

**PENGUKURAN PERFORMA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI (IPDN) JATINANGOR BERDASARKAN KINERJA
KEUANGAN DAN ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN
BELANJA PERIODE 2012-2017**

**Penulis :
Novia Aulia Supendi**

**Pembimbing :
Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA.**

ABSTRAK

IPDN Jatinangor merupakan Instansi sektor publik yang memiliki prinsip efektif dalam menghasilkan pendapatannya serta efisien dan ekonomis dalam melakukan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa IPDN Jatinangor berdasarkan kinerja keuangan dan analisis pertumbuhan pendapatan belanja. Dengan variabel yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio lancar, rasio cepat, rasio hutang terhadap asset, rasio hutang terhadap ekuitas, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis pertumbuhan belanja. Objek yang digunakan adalah Laporan Keuangan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. Hasil menunjukkan berdasarkan kinerja keuangan terdapat tiga rasio yang termasuk ke dalam kriteria baik, yaitu rasio efektivitas, likuiditas, dan solvabilitas sedangkan satu rasio menunjukkan kriteria yang tidak baik yaitu rasio efisiensi. Dan menurut analisis pertumbuhan pendapatan IPDN Jatinangor mengalami penurunan sejak 2015-2017 dan analisis pertumbuhan belanjanya mengalami fluktuasi.

Kata Kunci : Performa, Kinerja Keuangan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan belanja

**PERFORMANCE MEASUREMENT OF INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI (IPDN) JATINANGOR BASED ON FINANCIAL
PERFORMANCE AND ANALYSIS OF REVENUE EXPENSE PERIOD
2012-2017**

**Written by :
Novia Aulia Supendi**

**Preceptor :
Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA.**

ABSTRACT

IPDN Jatinangor is a public sector agency that has the principle of effective in generating income and efficient and economical in carrying out its operation. This study aims to determine the performance of IPDN Jatinangor based on financial performance and an analysis of spending revenue growth. With the variables used are effectiveness ratio, efficiency ratio, current ratio, quick ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, income growth analysis and expenditure growth analysis. The object used is the Financial Report at Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. The results show based on financial performance, there were three ratios which were included in the good criteria, they are ratio of effectiveness, liquidity, and solvency, while the others of ratio didn't show good criteria, that is efficiency ratio. Meanwhile, according to the analysis of the growth of revenue of IPDN Jatinangor has decreased since 2015-2017 and the analysis of expenditure growth has fluctuated.

Keywords: Performance, Financial Performance, Revenue and Expenditure Growth Analysis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Puji dan syukur terlebih dahulu penulis panjatkan kepada Allah yang maha pemurah karena atas rahmat, hidayah serta inayahnya allhamdulillah penulis masih diberi kekuatan dan keleluasaan berfikir sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengukuran Performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi Program S1 Manajemen. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan informasi serta pengetahuan yang diperoleh penulis, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan diterima penulis sebagai masukan yang berarti, sehingga diharapkan dalam penyusunan karya tulis lainnya penulis dapat menyusun dengan lebih baik guna peningkatan ke arah yang lebih baik.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, khususnya kepada :

1. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP. Selaku Ketua STIE EKUITAS Bandung.
2. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS Bandung.
3. Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS Bandung.
4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS Bandung.

5. Dr. Iim Hilman, SE., MM. Selaku Ketua Program S1 Manajemen STIE EKUITAS Bandung.
6. Mirza Hedismarlina Yuneline, ST., MBA., QWP. Selaku Sekretaris Program S1 Manajemen STIE EKUITAS Bandung.
7. Gatot Iwan Kurniawan, SE., MBA. Selaku Pembimbing yang telah sabar membantu dalam penyusunan Skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, serta berbaik hati untuk membimbing penulis hingga penyusunan Skripsi ini selesai.
8. Seluruh dosen dan staff STIE EKUITAS Bandung.
9. Agus Toyib, S.Sos., M.Si. Selaku Kepala Bagian Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
10. Seluruh staff keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
11. Kedua orangtua yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
12. Kakaku tercinta, Febrianty Hoerumi Supendi yang selalu memberi semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Kusuma Dewi Triyana, sebagai sahabat dan kaka yang selalu memberi dukungan terhadap penulis.
14. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan Skripsi ini yaitu Ira Maryani, Karin Sazkia Rustiani, Yanyan Cahyani, dan Saviera Aprilia.
15. Teman-teman satu bimbinganku Indra, Eva, Defa, Reni, Septi, Fatkha, Niko, Dan Silvi.

16. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan, penggunaan kata dan kalimat, serta sistematika penulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu tidak berlebihan bila penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Tidak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandung, 21 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN PROGRAM SARJANA

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1 Perusahaan Non Profit/Nirlaba.....	10
2.1.1.1 Pengertian Perusahaan Non Profit/Nirlaba.....	10
2.1.1.2 Karakteristik Perusahaan Non Profit/ Nirlaba	11
2.1.2 Manajemen Keuangan Sektor Publik	12
2.1.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Sektor Publik	12

2.1.2.2 Perbedaan Manajemen Keuangan Publik dan Bisnis.....	12
2.1.3 Laporan Keuangan Sektor Publik.....	13
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	13
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik	13
2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	14
2.1.4 Analisis Kinerja keuangan.....	16
2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan	16
2.1.4.2 Tujuan Analisis Kinerja atau Laporan Keuangan.....	17
2.1.4.3 Teknik Analisis Kinerja atau Laporan Keuangan.....	18
2.1.5 Analisis Rasio	19
2.1.5.1 Pengertian Rasio.....	19
2.1.5.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan	19
2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Rasio.....	20
2.1.5.4 Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik.....	26
2.1.6 Kajian Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kerangka Pemikiran	30
<u>BAB III</u> OBJEK DAN METODE PENELITIAN	34
3.1 Objek Penelitian	34
3.2 Metode Penelitian	34
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan.....	35
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian	36
3.2.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel	38

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.5 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Perhitungan Kinerja Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor	40
4.1.1.1 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas	40
4.1.1.2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi	42
4.1.1.3 Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas.....	45
4.1.1.4 Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas.....	49
4.1.2 Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor ...	52
4.1.2.1 Hasil Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan.....	52
4.1.2.2 Hasil Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja.....	54
4.2 Pembahasan Penelitian	55
4.2.1 Pembahasan Kinerja Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor	55
4.2.1.1 Pembahasan Rasio Efektivitas	56
4.2.1.2 Pembahasan Rasio Efisiensi	59
4.2.1.3 Pembahasan Rasio Likuiditas	62
4.2.1.4 Pembahasan Rasio Solvabilitas	67
4.2.2 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor	71

4.2.2.1 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Pendapatan	71
4.2.2.2 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Belanja	74
4.2.3 Pengukuran Performa Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1.1</u>	<u>Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Rutin Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	4
<u>Tabel 2.1</u>	<u>Perbedaan Manajemen Keuangan Publik dan Bisnis</u>	12
<u>Tabel 2.2</u>	<u>Kajian Penelitian Terdahulu</u>	27
<u>Tabel 3.1</u>	<u>Operasional Variabel</u>	36
<u>Tabel 4.1</u>	<u>Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan</u>	41
<u>Tabel 4.2</u>	<u>Tingkat Efektivitas Pendapatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	42
<u>Tabel 4.3</u>	<u>Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan</u>	43
<u>Tabel 4.4</u>	<u>Tingkat Efisiensi Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	44
<u>Tabel 4.5</u>	<u>Standar Perhitungan <i>Current Ratio</i></u>	45
<u>Tabel 4.6</u>	<u>Tingkat <i>Current Ratio</i> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	46
<u>Tabel 4.7</u>	<u>Standar Perhitungan <i>Quick Ratio</i></u>	47
<u>Tabel 4.8</u>	<u>Tingkat <i>Quick Ratio</i> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	48
<u>Tabel 4.9</u>	<u>Tingkat <i>Debt to Asset Ratio</i> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	50
<u>Tabel 4.10</u>	<u>Tingkat <i>Debt to Equity Ratio</i> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	51
<u>Tabel 4.11</u>	<u>Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Institut Pemerintahan</u>	

<u>Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u>	53
<u>Tabel 4.12 Tingkat Pertumbuhan Belanja Institut Pemerintahan Dalam</u>	
<u>Negeri (IPDN) Jatinangor.....</u>	54
<u>Tabel 4.13 Pengukuran Performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri</u>	
<u>(IPDN) Jatinangor Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis</u>	
<u>Pertumbuhan Pendapatan Belanja Periode 2012-2017</u>	77

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....</u>	33
<u>Gambar 4.1 Grafik Persentase Tingkat Efektivitas Institut Pemerintahan</u> <u> Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	56
<u>Gambar 4.2 Grafik Persentase Tingkat Efisiensi Institut Pemerintahan</u> <u> Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	60
<u>Gambar 4.3 Grafik Persentase Tingkat <i>Current Ratio</i> Institut</u> <u> Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	63
<u>Gambar 4.4 Grafik Persentase Tingkat <i>Quick Ratio</i> Institut Pemerintahan</u> <u> Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	65
<u>Gambar 4.5 Grafik Persentase Tingkat <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) Institut</u> <u> Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u> <u> Periode 2012-2017.....</u>	68
<u>Gambar 4.6 Grafik Persentase Tingkat <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)</u> <u> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor</u> <u> Periode 2012-2017.....</u>	70
<u>Gambar 4.7 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Institut Pemerintahan</u> <u> Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017</u>	72
<u>Gambar 4.8 Grafik Persentase Tingkat Pertumbuhan Belanja Institut</u> <u> Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017 ..</u>	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor Periode 2012-2017
- Lampiran 2 *Photocopy* Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 *Photocopy* Surat Keputusan Skripsi
- Lampiran 4 *Photocopy* Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 *Photocopy* Sertifikat Sekolah Pasar Modal (SPM)
- Lampiran 6 *Photocopy* Sertifikat *Company Visit*
- Lampiran 7 *Photocopy* Sertifikat SPEKTA
- Lampiran 8 *Photocopy* Surat Ijin Penelitian dan Pengambilan Data dari IPDN
Jatinangor
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan perekonomian di Indonesia didukung oleh 17 sektor ekonomi, dan salah satunya adalah sektor publik. Kegiatan utama dalam sektor publik yaitu menghasilkan barang serta layanan kepada masyarakat, sektor ini memiliki tujuan untuk tidak berorientasi pada keuntungan atau non profit, yang pada dasarnya memiliki tujuan berbeda dengan sektor ekonomi lainnya yaitu lebih berorientasi pada keuntungan atau profit. Ruang lingkup dari sektor publik ini meliputi lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, yayasan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam suatu perusahaan/instansi baik profit maupun non profit manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena manajemen keuangan bukan sekedar menyimpan seperangkat buku atau laporan yang akurat tetapi berfungsi sebagai pengelolaan keuangan sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan dana perusahaan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan perusahaan yang teratur dalam segi pengeluaran dan juga pemasukan, serta dengan kondisi keuangan yang baik maka perusahaan bisa menghadapi masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan konteks ekonomi, sektor publik bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui transformasi dari suatu kondisi lingkungan ekonomi yang berstatus *quo* (tetap) dan menuju ke lingkungan ekonomi yang lebih kondusif untuk menghadapi dan mengelola

ketidakpastian. Meskipun sektor publik tidak berorientasi pada keuntungan bukan berarti bahwa sektor ini tidak memiliki pengelolaan keuangan. Karena dalam setiap perusahaan baik profit ataupun non profit tentunya akan dilakukan penyusunan suatu laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah berkembang.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, sektor publik memiliki perbedaan dengan sektor lainnya karena hal yang menyangkut laporan keuangan pada sektor ini telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjelaskan mengenai identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dan laporan keuangan sektor publik ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Meskipun sektor publik tidak berorientasi terhadap keuntungan tetapi sektor ini tetap memiliki prinsip efektivitas dalam menggunakan pendapatannya, serta prinsip efisiensi dan ekonomis dalam melakukan belanja/ pembiayaan. Sehingga sesuai dengan prinsip tersebut seharusnya terdapat pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan/ instansi sektor publik, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan telah menjalankan prinsip tersebut dengan baik atau sebaliknya. Terdapat berbagai macam metode untuk mengukur suatu kinerja keuangan dan salah satunya adalah analisis rasio.

Pada sektor ekonomi yang berorientasi terhadap keuntungan atau profit, pengukuran kinerja keuangan dengan metode analisis rasio sudah biasa digunakan

karena dianggap sebagai tolak ukur untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Tetapi berbeda dengan perusahaan non profit khususnya pada sektor publik, penggunaan analisis rasio sebagai pengukuran kinerja keuangan masih jarang dilakukan karena pada umumnya perusahaan/ instansi sektor publik lebih mengandalkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan. Padahal akan lebih baik jika pengukuran kinerja keuangan dilakukan oleh perusahaan/ instansi itu sendiri, sehingga dapat mengevaluasi, membuat perencanaan terhadap aktivitas keuangan yang akan dilakukan, serta melakukan pengendalian terlebih dahulu terhadap masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa ruang lingkup dalam sektor publik yaitu meliputi lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, yayasan sosial, dan lain sebagainya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor merupakan salah satu instansi sektor publik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya seluruh biaya yang digunakan oleh IPDN bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga sudah pasti bahwa IPDN memegang prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Untuk mengetahui apakah prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik atau tidak, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan, karena di IPDN sendiri tidak terdapat pengukuran khusus terhadap kinerja keuangan.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Rutin Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Tahun	Pendapatan		Belanja Rutin	
	Realisasi (Rp)	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)
2012	4.907.150.885	4.259.163.000	62.083.141.286	62.680.415.000
2013	5.911.379.957	5.222.255.000	73.015.735.013	75.201.095.000
2014	9.538.130.238	8.312.804.000	81.321.324.934	82.171.549.000
2015	13.447.481.655	14.818.946.000	110.586.365.117	127.119.547.000
2016	14.719.621.206	17.605.196.000	129.594.921.080	137.538.587.000
2017	13.012.859.729	13.621.675.000	126.416.224.063	133.143.503.000

Sumber : Laporan Keuangan Institut Pemerintahan Negeri (IPDN)

Jatinangor

Efektivitas dalam instansi sektor publik merupakan suatu tingkat pencapaian hasil (Pendapatan) dengan target yang yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau bahkan melebihi target.

Berdasarkan Tabel 1.1 pendapatan IPDN yang mencapai/melebihi target hanya berada di tahun 2012 dengan realisasi pendapatan Rp. 4.907.150.885 dan anggaran sebesar Rp. 4.259.163.000 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 647.987.885, selanjutnya berada pada tahun 2013 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.911.379.957 dan anggaran sebesar Rp.5.222.255.000 sehingga terdapat selisih lebih Rp.689.124.957, dan yang terakhir pada tahun 2014 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 9.538.130.238 dengan anggaran yaitu Rp. 8.312.804.000 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.1.225.326.238.

Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya tingkat pencapaian hasil tidak ada yang memenuhi target, sehingga hal tersebut akan diukur melalui analisis kinerja keuangan, apakah hasil pencapaian tersebut masih terbilang efektif atau tidak.

Tingkat efisiensi dalam ruang lingkup sektor publik menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan Tabel 1.1 sudah terlihat jelas bahwa pengeluaran/belanja yang dilakukan oleh IPDN sangat tidak efisien karena belanja yang dilakukan sudah sangat melebihi penerimaan yang didapatkan. Meskipun begitu IPDN tetap dapat melakukan belanja dengan nominal tersebut karena pada dasarnya belanja yang dilakukan oleh IPDN telah ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Negara.

Tetapi akan lebih baik jika IPDN tetap melakukan belanja secara efisien meskipun segalanya dibiayai oleh pemerintah, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai penyebab dari ketidakefisienan yang terjadi pada belanja rutin di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

. South, dkk (2016) Berdasarkan kinerja keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata di atas 100%, hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Widiyanti (2014) Hasil menunjukkan secara keseluruhan hasil rasio likuiditas PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk, secara keseluruhan rasio

solvabilitas PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk, secara keseluruhan rasio aktivitas PT. Holcim Indonesia lebih baik dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan secara keseluruhan rasio profitabilitas PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk. Sedangkan menurut Rakhmawati, dkk (2017) Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat likuiditasnya yaitu *current ratio* mengalami kenaikan setiap tahun, *quick ratio* mengalami kondisi yang kurang baik sementara *cash ratio* nya mengalami fluktuasi. Pada tingkat solvabilitasnya yaitu DAR mengalami kondisi solvable dan pada *net worth to debt rationya* dalam keadaan insolvable. Pada tingkat profitabilitasnya yaitu GPM dan NPM mengalami fluktuasi serta pada ROA mengalami penurunan dan pada ROE dalam kondisi fluktuasi. Kemudian menurut Nurhayati (2015) Rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur melalui rasio kemandirian daerah sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio efektivitas tahun anggaran 2009-2012 sangat efektif sedangkan rasio efisiensi tahun anggaran 2009-2012 sangat efisien, rasio aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan dan pertumbuhan pendapatan adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012. Dan menurut Tooy, dkk (2017) menyatakan bahwa Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG selama tahun anggaran 2011-2015 rata-rata berada di tingkat 90%-100% artinya laporan realisasi anggaran kurang efisien, sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran

BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara selama tahun anggaran 2011-2015 pada tingkat 100% yaitu sangat efektif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas akan menarik jika dilakukan penelitian dengan judul **“Pengukuran Performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Belanja Periode 2012-2017 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang diukur menggunakan rasio?
2. Bagaimana pertumbuhan pendapatan dan belanja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor ?
3. Bagaimana performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor berdasarkan kinerja keuangan dan analisis pertumbuhan pendapatan belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang diukur menggunakan rasio.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan dan belanja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

3. Untuk mengetahui performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor berdasarkan kinerja keuangan dan analisis pertumbuhan pendapatan belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang bersangkutan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan, bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui kinerja keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

2. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau masukan pihak lain, khususnya bagi penulis selanjutnya pada bidang manajemen keuangan.

- a. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaannya di dalam praktik.

b. Manfaat bagi akademis

Sebagai sumber atau bahan kepustakaan yang berguna bagi peneliti yang ingin menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan dan performa perusahaan.

c. Manfaat bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini, sebagai masukan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

d. Manfaat bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perusahaan Non Profit/Nirlaba

2.1.1.1 Pengertian Perusahaan Non Profit/Nirlaba

Menurut PSAK No.45 Tahun 2009 organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Perusahaan non profit atau nirlaba adalah perusahaan yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan masyarakat dan tidak berorientasi untuk mengejar uang. Contoh perusahaan non profit adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penelitian, LSM, unit-unit pemerintahan dan lain sebagainya.

Istilah nirlaba terdiri dari dua kata yaitu "*nir*" yang berarti tidak dan "*laba*" yang berarti keuntungan. Nirlaba berarti segala sesuatu yang sifatnya tidak mengutamakan perolehan keuntungan. Semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu dan biasanya berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Perusahaan nirlaba ada yang dimiliki pihak pemerintah dan ada pula yang dimiliki oleh pihak swasta. Puskesmas, rumah sakit umum dan sekolah merupakan contoh dari perusahaan nirlaba yang didirikan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan contoh dari perusahaan nirlaba yang didirikan oleh pihak swasta adalah panti asuhan, yayasan amal dan lain sebagainya.

Setiap perusahaan pasti membutuhkan pendanaan untuk menjalankan kegiatannya. Sumber dana perusahaan nirlaba yang didirikan oleh pihak swasta berasal dari sumbangan anggotanya dan para donatur. Sedangkan sumber dana perusahaan nirlaba yang didirikan oleh pihak pemerintah berasal dari pendapatan negara. Walaupun tidak berorientasi pada perolehan keuntungan, perusahaan nirlaba tetap harus dikelola dengan serius. Bahkan pengelolaannya harus lebih hati-hati serta kualitas pun harus dijaga karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak.

2.1.1.2 Karakteristik Perusahaan Non Profit/ Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 Tahun 2009, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mengambil laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada perusahaan bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam perusahaan nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

2.1.2 Manajemen Keuangan Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Sektor Publik

Manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat atau daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan mulai dari pengelolaan, penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan (Halim, 2014:3).

2.1.2.2 Perbedaan Manajemen Keuangan Publik dan Bisnis

Tabel 2.1

Perbedaan Manajemen Keuangan Publik dan Bisnis

Faktor Pembeda	Manajemen Keuangan Publik	Manajemen Keuangan Swasta
Tujuan Organisasi	Non profit motif	Profit Motif
Sumber Pendanaan	Pajak, restribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara dll.	Pembiayaan internal : modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggung Jawaban	Pertanggung jawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/ DPRD).	Pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, hirarkis	Fleksibel : datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
Sistem Akuntansi	<i>Cash accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>

Sumber : Mardiasmo (2009)

2.1.3 Laporan Keuangan Sektor Publik

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2014:2) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut PSAK No.45 Tahun 2009 pada unit pemerintahan tujuan umum laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, pos-pos berikut : (a) saldo anggaran lebih awal (b) penggunaan saldo anggaran lebih (c) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

tahun berjalan (d) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan (e) lain-lain saldo anggaran lebih akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen laporan keuangan di atas disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali (a) laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2.1.4 Analisis Kinerja keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013:189).

Menurut Fahmi (2014:2) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu hasil keberhasilan perusahaan atas pencapaian dari aktivitas di bidang keuangan.

2.1.4.2 Tujuan Analisis Kinerja atau Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:68) secara umum tujuan analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk memenuhi langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil kinerja yang tercapai.

2.1.4.3 Teknik Analisis Kinerja atau Laporan Keuangan

Teknik analisis laporan keuangan menurut Harahap (2015:217) :

1. Metode Komparatif

Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya

2. *Trend Analysis*

Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dari gambaran ini sebenarnya dapat kita bayangkan kecenderungan (*trend*) situasi perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan pada masa lalu sampai masa kini. Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan trendnya. Trend analisis ini biasanya dibuat melalui grafik.

3. *Common Size Financial Statement*

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk prestasi. Prestasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya asset untuk neraca, penjualan untuk laba rugi.

4. *Index Time Series*

Metode ini dihitung *index* dan digunakan untuk menkonfersikan angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi *index* 100. Beranjak dari tahun dasar ini, dibuat index tahun-tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode lain.

5. Rasio Laporan Keuangan

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antar pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos yang lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antar pos dan dapat membandingkannya dengan rasio sehingga dapat diberi penilaian

6. Analisis Sumber Penggunaan Kas dan Dana

Analisis sumber penggunaan kas dan dan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan dua periode, laporan ini dibandingkan dan dilihat mutasinya. Setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya.

2.1.5 Analisis Rasio

2.1.5.1 Pengertian Rasio

Menurut Kasmir (2014:104) Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

2.1.5.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Manfaat analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2014:47) yaitu :

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari prespektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Rasio

Untuk mengukur suatu kinerja keuangan dapat digunakan beberapa jenis rasio. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu, kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan.

Menurut Harahap (2015:301) jenis-jenis rasio keuangan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau pada saat ditagih (Rakhmawati dkk, 2017).

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki (Rakhmawati dkk, 2017).

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid (Rakhmawati dkk, 2017).

$$\text{Rasio Cepat (Quick Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan kas yang tersedia di bank (Rakhmawati dkk, 2017).

$$\text{Rasio Kas (Cash Ratio)} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan/ dilikuidasi (Widiyanti, 2014).

a. *Debt to Asset Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva (Widiyanti, 2014).

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Standar umum rata-rata industri sebesar 90% (Widiyanti, 2014).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Widiyanti, 2014).

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Rasio Rentabilitas/ Profitabilitas

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada (Harahap, 2015 : 301).

a. *Gross Profit Margin*

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan (Widiyanti, 2014).

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Net Profit Margin*

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Widiyanti, 2014).

$$\text{NPM} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return on Investment*

Rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, ROI juga merupakan suatu pengukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Widiyanti, 2014).

$$\text{ROI} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity*

Merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio maka semakin baik (Widiyanti, 2014).

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

e. *Earning per Share*

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham (Widiyanti, 2014).

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya (Harahap, 2015:301).

a. *Receivable Turn Over*

Rasio untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode (Widiyanti, 2014).

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}} \times 100\%$$

b. *Inventory Turn Over*

Rasio untuk mengukur berapa kali dan yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam suatu periode (Widiyanti, 2014).

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$$

c. *Working Capital Turn Over*

Mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode (Widiyanti, 2014).

$$\text{Working Capital Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Net Working Capital}} \times 100\%$$

d. *Total Assets Turn Over*

Mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Widiyanti, 2014).

$$\text{TATO} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun (Harahap, 2015:301).

Menurut Nurhayati (2015) untuk mengukur kinerja maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan tinggi kemandirian daerahnya (Nurhayati, 2015).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli}}{\text{Bantuan Pemerintah} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Nurhayati, 2015).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan . semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely* (Suoth dkk, 2016).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik, begitupun sebaliknya (Tooy dkk, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

5. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Nurhayati, 2015).

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini akan digunakan 4 jenis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

2.1.5.4 Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2006) yang dikutip oleh Mirza (2012) terdapat 2 analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik :

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan

pendapatan secara positif atau negatif. Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan.

$$\text{Analisis Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t - (t - 1)}{\text{Realisasi Pendapatan } t - 1}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik, alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } t - (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja } t - 1}$$

2.1.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1.	South, dkk (2016)	Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Berdasarkan kinerja keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan

		Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan	keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata di atas 100%, hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi selama tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
2.	Widiyanti (2014)	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Holcim Indonesia Tbk dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Hasil menunjukkan secara keseluruhan hasil rasio likuiditas PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk, secara keseluruhan rasio solvabilitas PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk, secara keseluruhan rasio aktivitas PT. Holcim Indonesia lebih baik dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan secara keseluruhan rasio profitabilitas PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lebih baik dari PT. Holcim Indonesia Tbk.

3.	Rakhmawati, dkk (2017)	Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Guna Mengukur Kinerja Keuangan PT. Vevo Indah Pratama Gresik	Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat likuiditasnya yaitu <i>current ratio</i> mengalami kenaikan setiap tahun, <i>quick ratio</i> mengalami kondisi yang kurang baik sementara <i>cash rasionya</i> mengalami fluktuasi. Pada tingkat solvabilitasnya yaitu DAR mengalami kondisi <i>solvable</i> dan pada <i>net worth to debt rasionya</i> dalam keadaan <i>insolvable</i> . Pada tingkat profitabilitasnya yaitu GPM dan NPM mengalami fluktuasi serta pada ROA mengalami penurunan dan pada ROE dalam kondisi fluktuasi.
4.	Nurhayati (2015)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur melalui rasio kemandirian daerah sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio efektivitas tahun anggaran 2009-2012 sangat efektif sedangkan rasio efisiensi tahun anggaran 2009-2012 sangat efisien, rasio aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio

			belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan dan pertumbuhan pendapatan adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.
5.	Tooy, dkk (2016)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara	Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG selama tahun anggaran 2011-2015 rata-rata berada di tingkat 90%-100% artinya laporan realisasi anggaran kurang efisien, sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara selama tahun anggaran 2011-2015 pada tingkat 100% yaitu sangat efektif.

Sumber : Data diolah Penulis (2019)

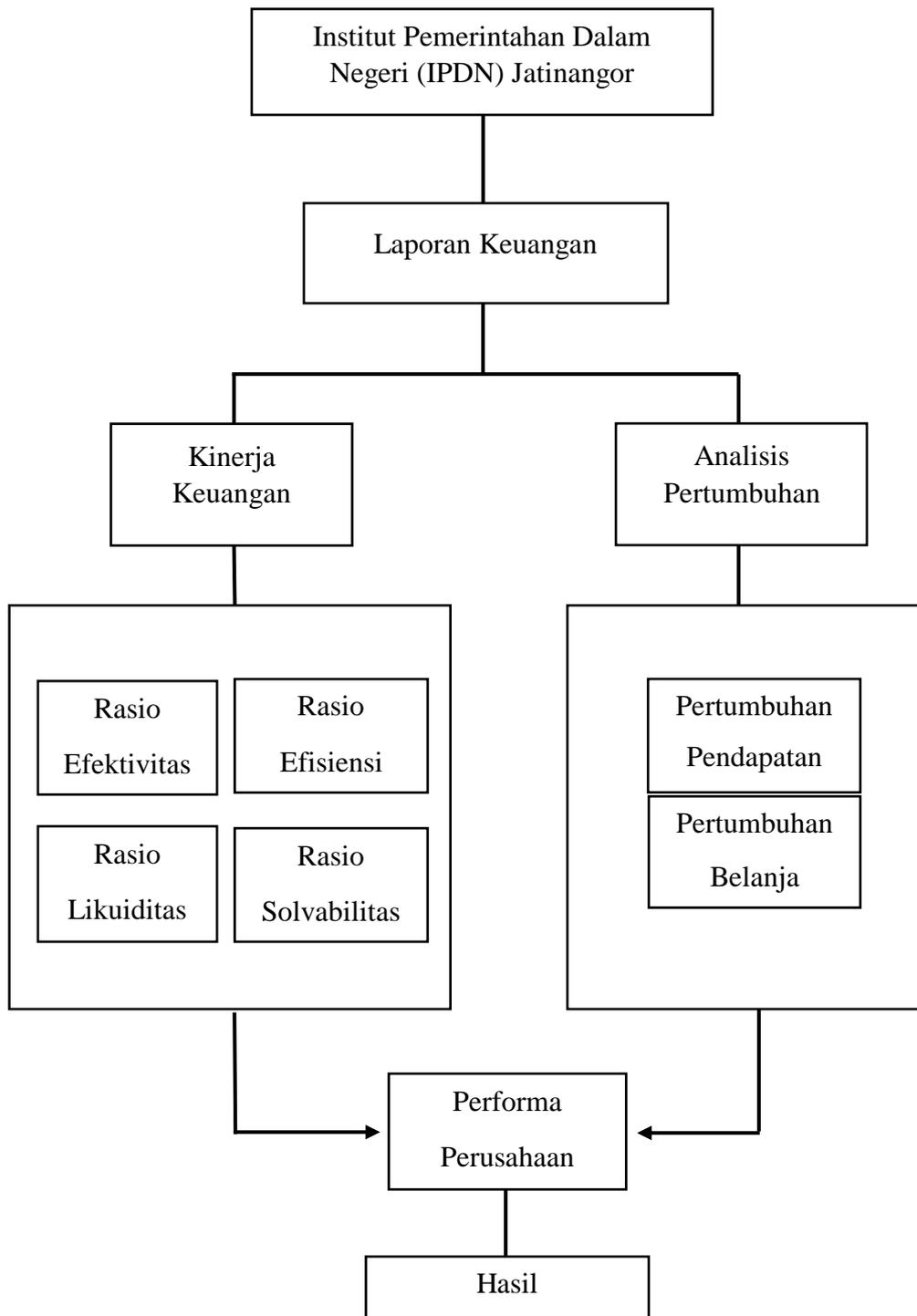
2.2 Kerangka Pemikiran

Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio, yaitu menggabungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lain, analisis rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Menurut Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006, agar

mencapai hasil yang optimal manajemen perusahaan harus bekerja secara efisien. Analisis keuangan memiliki peran yang penting untuk mendapatkan tolak ukur tertentu untuk dapat membandingkan efisien dan efektivitas yang dicapai oleh perusahaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebaliknya atau sesudahnya.

Dalam instansi sektor publik tetap menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta ekonomis meskipun instansi pada sektor ini tidak berorientasi terhadap keuntungan. Berkaitan dengan prinsip tersebut sehingga perlu adanya analisis rasio keuangan untuk membuktikan penerapan prinsip tersebut. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara selain pendapatan hibah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder. Dari data keuangan instansi sektor publik dapat digunakan rasio likuiditas dan solvabilitas, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mendanai kebutuhan, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam sektor ini juga terdapat analisis khusus mengenai analisis pertumbuhan pendapatan dan juga belanja. Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya, jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Performa

keuangan yang baik akan berguna bagi instansi itu sendiri untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya dalam kinerja keuangan, serta bagi pemerintah pusat untuk mengetahui bahwa instansi tersebut telah melakukan prinsip efektivitas, efisien, dan ekonomis dengan baik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Olahan Penulis (2019)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor merupakan lembaga pendidikan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Status Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penyelenggara pendidikan kedinasan diteguhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 tahun 2009. Dengan penegasan ini telah ditetapkan bahwa, semua biaya operasional termasuk biaya operasional pendidikan tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

pada kegiatan instansi sektor publik terdapat prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam melaksanakan kegiatan keuangannya, sehingga perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui apakah prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Oleh karena itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang diukur menggunakan kinerja keuangan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian

ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2014:2).

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

1. Metode Deskriptif

Metode penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2013:12).

2. Metode Kuantitatif

Menurut Kuncoro (2013:145), data kuantitatif adalah data yang diukur dengan skala numerik (angka). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi.

3. Metode Evaluasi

Menurut Sukmadinata (2013:120) penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Nilai atau manfaat dari suatu praktik didasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolut ataupun relatif.

Sesuai dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian, lalu menguji lebih dalam data tersebut menggunakan metode kuantitatif. Dan performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor akan diuji menggunakan evaluasi penelitian.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu Pengukuran Performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Belanja, maka operasional dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Rasio Efektivitas	Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan . semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada <i>outcome</i> (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau <i>spending wisely</i> (Suoth dkk, 2016).	$\frac{RP}{Target} \times 100\%$	Rasio
Rasio Efisiensi	Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, semakin kecil rasio efisiensi maka	$\frac{Belanja}{Penerimaan} \times 100\%$	Rasio

	semakin baik, begitupun sebaliknya (Tooy dkk, 2016).		
Rasio Likuiditas (<i>Current Ratio</i>)	Rasio likuiditas <i>current ratio</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki (Rakhmawati dkk, 2017).	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Likuiditas (<i>Quick Ratio</i>)	Rasio likuiditas <i>quick ratio</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid (Rakhmawati dkk, 2017).	$\frac{\text{A. Lancar} - \text{Pers}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	
Rasio Solvabilitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, standar umum rata-rata sebesar 90%. Bila di atas rata-rata perusahaan dianggap kurang baik (Widiyanti, 2014).	$\frac{\text{T. Utang}}{\text{T. Ekuitas}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Solvabilitas (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	Rasio solvabilitas <i>debt to asset ratio</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara modal utang dengan total aktiva, dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Rakhmawati dkk, 2017).	$\frac{\text{T. Utang}}{\text{T. Asset}} \times 100\%$	Rasio
Analisis Pertumbuhan Pendapatan	Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran. Kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara	$\frac{\text{RP } t - (t - 1)}{\text{RP } t - 1}$	Rasio

	positif atau negatif. Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya, jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan (Mirza, 2012).		
Analisis Pertumbuhan Belanja	Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik. Alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang, dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Mirza, 2012).	$\frac{RB_t - (t - 1)}{RB_{t - 1}}$	Rasio

Sumber : Data Diolah Penulis (2019)

Keterangan : RP = Realisasi Pendapatan

RB = Realisasi Belanja

BP = Bantuan Pusat

3.2.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro,

2013:118). Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan referensi-referensi seperti : buku, jurnal, artikel.
2. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data keuangan atau laporan keuangan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:244) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data tersebut terdiri dari laporan keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor periode 2012-2017. Analisis data diawali dengan menghitung kinerja keuangan dengan metode analisis rasio keuangan menggunakan *software Microsoft Excel*. Kemudian menganalisis mengenai pertumbuhan pendapatan dan belanja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor untuk mengetahui performa dari instansi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perhitungan Kinerja Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Perhitungan kinerja keuangan ini dilakukan dengan mengolah data dari laporan keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor selama periode 2012-2017. Perhitungan ini dilakukan menggunakan analisis rasio sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan diperoleh rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio likuiditas (*Current Ratio* dan *Quick Ratio*), dan rasio solvabilitas (*Debt to Asset Ratio & Debt to Equity Ratio*).

4.1.1.1 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely* (Suoth dkk, 2016).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara selain pendapatan hibah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Efektivitas dalam instansi sektor publik merupakan suatu tingkat pencapaian hasil (Pendapatan) dengan target yang ditetapkan, suatu

hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau bahkan melebihi target.

Berikut adalah tabel kriteria mengenai standar dari rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	$\geq 100\%$
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	$\leq 75\%$

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria tersebut kemudian untuk mendapatkan nilai dari rasio yang akan di plot pada tabel di atas maka dilakukan penjumlahan dasar menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dari data yang dikumpulkan maka didapat hasil dari rumus di atas, dan rasio efektivitas secara detail dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Pendapatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor Periode 2012-2017

Tahun	Rasio Efektivitas	Keterangan
2012	$\frac{\text{Rp. 4.907.150.885}}{\text{Rp. 4.259.163.000}} \times 100\% = 115,21\%$	Sangat Efektif
2013	$\frac{\text{Rp. 5.911.379.957}}{\text{Rp. 5.222.255.000}} \times 100\% = 113,19\%$	Sangat Efektif
2014	$\frac{\text{Rp. 9.538.130.238}}{\text{Rp. 8.312.804.000}} \times 100\% = 114,74\%$	Sangat Efektif
2015	$\frac{\text{Rp. 13.447.481.655}}{\text{Rp. 14.818.946.000}} \times 100\% = 90,7\%$	Cukup Efektif
2016	$\frac{\text{Rp. 14.719.621.206}}{\text{Rp. 17.605.196.000}} \times 100\% = 83,60\%$	Kurang Efektif
2017	$\frac{\text{Rp. 13.012.859.729}}{\text{Rp. 13.621.675.000}} \times 100\% = 95,53\%$	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor
(2019)

Berdasarkan tabel 4.2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor berada pada kriteria sangat efektif hanya terjadi pada tahun 2012-2014, sedangkan pada kriteria cukup efektif terjadi pada tahun 2015 dan 2017, kemudian titik terendah rasio efektivitas berada pada tahun 2016 dengan kriteria kurang efektif.

4.1.1.2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan,

semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik, begitupun sebaliknya (Tooy dkk, 2016).

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolut, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio efisiensi belanja. Jika tingkat efisiensi rendah, artinya belanja negara semakin kecil sehingga kinerja pemerintah semakin membaik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekan belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara.

Untuk mengetahui rendah tingginya rasio efisiensi suatu instansi maka diperlukan suatu kriteria atau standar yang dapat menentukan hal tersebut, dan standar tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	$\geq 100\%$
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80 - 90%
Efisien	60 - 80%
Sangat Efisien	$\leq 60\%$

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Untuk mengetahui suatu rasio efisiensi maka dalam penelitian ini akan dilakukan suatu perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas maka akan diuraikan melalui tabel 4.4 mengenai hasil dari perhitungan rasio efisiensi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Tabel 4.4
Tingkat Efisiensi Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor Periode 2012-2017

Tahun	Rasio Efisiensi	Keterangan
2012	$\frac{\text{Rp. 62.083.141.286}}{\text{Rp. 4.907.150.885}} \times 100\% = 1.265\%$	Tidak Efisien
2013	$\frac{\text{Rp. 73.015.735.013}}{\text{Rp. 5.911.379.957}} \times 100\% = 1.235\%$	Tidak Efisien
2014	$\frac{\text{Rp. 81.321.324.934}}{\text{Rp. 9.538.130.238}} \times 100\% = 852\%$	Tidak Efisien
2015	$\frac{\text{Rp. 110.586.365.117}}{\text{Rp. 13.447.481.655}} \times 100\% = 822\%$	Tidak Efisien
2016	$\frac{\text{Rp. 129.594.921.080}}{\text{Rp. 14.719.621.026}} \times 100\% = 880\%$	Tidak Efisien
2017	$\frac{\text{Rp. 126.416.224.063}}{\text{Rp. 13.012.859.729}} \times 100\% = 971\%$	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN

Jatinangor(2019)

Berdasarkan tabel 4.4 tingkat rasio efisiensi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari tahun 2012-2017 berada pada kriteria tidak efisien, karena dalam perhitungan di atas hasil persentase selalu melebihi angka 100%.

4.1.1.3 Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau pada saat ditagih (Rakhmawati dkk, 2017).

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar (Rakhmawati dkk, 2017).

Terdapat beberapa kriteria untuk menilai seberapa baik mengenai tingkat persentase dari *current ratio*, kriteria tersebut dapat dilihat melalui tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Standar Perhitungan *Current Ratio*

Standar	Kriteria
$\geq 200\%$	Sangat Baik
150% - 199%	Baik
100% - 149%	Cukup Baik
50% - 99%	Kurang Baik
$\leq 50\%$	Buruk

Sumber : Pemenkop-UKM RI 2006

Untuk mengetahui tingkat persentase dari *current ratio* maka akan dihitung melalui formula/rumus sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Penerapan dari rumus di atas maka tingkat *current ratio* dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor akan dijabarkan melalui tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Tingkat *Current Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor

Tahun	Tingkat <i>Current Ratio</i>	Kriteria
2012	$\frac{\text{Rp. 4.363.035.057}}{\text{Rp. 450.143.934}} \times 100\% = 969\%$	Sangat Baik
2013	$\frac{\text{Rp. 5.404.612.773}}{\text{Rp. 304.481.815}} \times 100\% = 1.775\%$	Sangat Baik
2014	$\frac{\text{Rp. 11.466.987.246}}{\text{Rp. 2.496.510.668}} \times 100\% = 459\%$	Sangat Baik
2015	$\frac{\text{Rp. 16.418.502.856}}{\text{Rp. 2.132.739.942}} \times 100\% = 769\%$	Sangat Baik
2016	$\frac{\text{Rp. 23.034.337.006}}{\text{Rp. 853.360.985}} \times 100\% = 2.699\%$	Sangat Baik
2017	$\frac{\text{Rp. 29.760.230.808}}{\text{Rp. 124.853.208}} \times 100\% = 23.836\%$	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor

(2019)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.6 maka didapatkan hasil bahwa tingkat *current ratio* periode 2012-2017 berada pada kriteria yang sangat baik dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 23.836% dan persentase terendah berada pada tahun 2014 yaitu 459%.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid (Rakhmawati dkk, 2017).

Standar persentase dari *quick ratio* dapat dilihat dari tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Standar Perhitungan *Quick Ratio*

Standar	Kriteria
$\geq 200\%$	Sangat Baik
150% - 199%	Baik
100% - 149%	Cukup Baik
50% - 99%	Kurang Baik
$\leq 50\%$	Buruk

Sumber : Pemenkop-UKM RI 2006

Formula yang akan digunakan dalam perhitungan *quick ratio* adalah sebagai berikut :

$$Quick Ratio = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Secara lebih mendetail mengenai hasil dari perhitungan *quick ratio* berdasarkan formula di atas maka akan diteliti lebih lanjut pada tabel 4.8

Tabel 4.8

Tingkat *Quick Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Tahun	Tingkat <i>Quick Ratio</i>	Kriteria
2012	$\frac{\text{Rp. 4.363.035.057} - \text{Rp. 602.193.134}}{\text{Rp. 450.143.934}} \times 100\% = 835\%$	Sangat Baik
2013	$\frac{\text{Rp. 5.404.612.773} - \text{Rp. 727.623.571}}{\text{Rp. 304.481.815}} \times 100 = 1.536\%$	Sangat Baik
2014	$\frac{\text{Rp. 11.466.987.246} - \text{Rp. 708.288.821}}{\text{Rp. 2.496.510.668}} \times 100 = 430\%$	Sangat Baik
2015	$\frac{\text{Rp. 16.418.502.856} - \text{Rp. 819.773.923}}{\text{Rp. 2.132.739.942}} \times 100 = 731\%$	Sangat Baik
2016	$\frac{\text{Rp. 23.034.337.006} - \text{Rp. 428.108.792}}{\text{Rp. 853.360.985}} \times 100\% = 2.649\%$	Sangat Baik
2017	$\frac{\text{Rp. 29.760.230.808} - \text{Rp. 761.810.503}}{\text{Rp. 124.853.208}} \times 100\% = 23.226\%$	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor

(2019)

Berdasarkan tabel 4.8 tingkat *quick ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor periode 2012-2017 berada pada kriteria sangat baik,

dengan persentase tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu 23.226% dan persentase terendah berada pada tahun 2014 yaitu 430%.

4.1.1.4 Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan/ dilikuidasi (Widiyanti, 2014).

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang, standar pengukuran rata-rata adalah 35% (Widiyanti, 2014).

Dengan data yang telah didapatkan maka tingkat *Debt to Asset Ratio* (DAR) dalam penelitian ini akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Asset} \times 100\%$$

Penggunaan rumus DAR di atas akan diterapkan melalui perhitungan yang di plot pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Tingkat *Debt to Asset Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor

Tahun	<i>Debt to Asset Ratio</i>	Keterangan
2012	$\frac{\text{Rp. 450.143.934}}{\text{Rp. 1.582.869.600.335}} \times 100\% = 0.028\%$	Solvable
2013	$\frac{\text{Rp. 304.481.815}}{\text{Rp. 1.472.603.262.311}} \times 100\% = 0.020\%$	Solvable
2014	$\frac{\text{Rp. 242.135.192}}{\text{Rp. 1.548.932.735.145}} \times 100\% = 0.015\%$	Solvable
2015	$\frac{\text{Rp. 2.132.739.942}}{\text{Rp. 1.552.017.177.566}} \times 100\% = 0.137\%$	Solvable
2016	$\frac{\text{Rp. 853.360.985}}{\text{Rp. 1.392.074.967.769}} \times 100\% = 0.06\%$	Solvable
2017	$\frac{\text{Rp. 124.853.208}}{\text{Rp. 1.384.814.729.680}} \times 100\% = 0.009\%$	Solvable

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor

(2019)

Dari perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.9 maka diperoleh hasil bahwa *debt to asset ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor periode 2012-2017 berada pada kriteria yang baik atau solvable

dengan tingkat persentase tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 0,137% dan tingkat persentase terendah berada pada tahun 2017 yaitu 0,009%.

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, standar umum rata-rata sebesar 90%. Bila di atas rata-rata perusahaan dianggap kurang baik (Widiyanti, 2014). Untuk mengetahui tingkat persentase *debt to equity ratio* maka diperlukan suatu formula dalam mendapatkan sebuah hasil, dan di bawah ini merupakan formula yang akan digunakan :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Pada tabel 4.10 akan dilakukan perhitungan yang lebih jelas mengenai tingkat persentase *debt to equity ratio*

Tabel 4.10
Tingkat *Debt to Equity Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor

Tahun	<i>Debt to Equity Ratio</i>	Keterangan
2012	$\frac{\text{Rp. 450.143.934}}{\text{Rp. 1.582.419.456.401}} \times 100\% = 0.028\%$	Solvable
2013	$\frac{\text{Rp. 304.481.815}}{\text{Rp. 1.472.298.780.496}} \times 100\% = 0.020\%$	Solvable
2014	$\frac{\text{Rp. 242.135.192}}{\text{Rp. 1.548.690.599.953}} \times 100\% = 0.015\%$	Solvable
2015	$\frac{\text{Rp. 2.132.739.942}}{\text{Rp. 1.594.884.437.624}} \times 100\% = 0.137\%$	Solvable
2016	$\frac{\text{Rp. 853.360.985}}{\text{Rp. 1.391.221.606.784}} \times 100\% = 0.06\%$	Solvable

2017	$\frac{\text{Rp. } 124.853.208}{\text{Rp. } 1.384.689.876.472} \times 100\% = 0.009\%$	Solvable
------	--	----------

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor (2019)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.10 menunjukkan tingkat persentase *debt to equity ratio* berada pada kriteria yang baik atau solvable, dengan tingkat persentase tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 0,137% dan tingkat persentase terendah berada pada tahun 2017 yaitu 0,009%.

4.1.2 Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja ini dilakukan dengan mengolah data dari laporan keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor selama periode 2012-2017. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perkembangan dari pendapatan yang diperoleh serta belanja yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, apakah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Berikut hasil perhitungan dari analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja IPDN Jatinangor :

4.1.2.1 Hasil Perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran. Kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan.

Sebaliknya, jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan (Mirza, 2012).

Untuk mengetahui mengenai pertumbuhan pendapatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor maka akan dilakukan sebuah perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Analisis Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t - (t - 1)}{\text{Realisasi Pendapatan } t - 1}$$

Rumus di atas akan diterapkan melalui sebuah perhitungan pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Tahun	Analisis Pertumbuhan Pendapatan
2012	-
2013	$\frac{\text{Rp. 5.911.379.957} - \text{Rp. 4.907.150.885}}{\text{Rp. 4.907.150.885}} \times 100\% = 20\%$
2014	$\frac{\text{Rp. 9.538.130.238} - \text{Rp. 5.911.379.957}}{\text{Rp. 5.911.379.957}} \times 100\% = 61\%$
2015	$\frac{\text{Rp. 13.447.481.655} - \text{Rp. 9.538.130.238}}{\text{Rp. 9.538.130.238}} \times 100\% = 40\%$
2016	$\frac{\text{Rp. 14.719.621.206} - \text{Rp. 13.447.481.655}}{\text{Rp. 13.447.481.655}} \times 100\% = 9\%$
2017	$\frac{\text{Rp. 13.012.859.729} - \text{Rp. 14.719.621.206}}{\text{Rp. 14.719.621.206}} \times 100\% = -11\%$

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat

persentase 61% sedangkan pertumbuhan pendapatan yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat persentase sebesar -11%.

4.1.2.2 Hasil Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik. Alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang, dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Mirza, 2012).

Di bawah ini merupakan formula yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan belanja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor :

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } t - (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja } t - 1}$$

Penggunaan rumus di atas akan diterapkan melalui perhitungan pada tabel 4.12 sehingga dapat diketahui mengenai pertumbuhan belanja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor :

Tabel 4.12
Tingkat Pertumbuhan Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor

Tahun	Analisis Pertumbuhan Belanja
2012	-
2013	$\frac{Rp. 321.801.875.219 - Rp. 248.555.675.519}{Rp. 248.555.675.519} \times 100\% = 29\%$
2014	$\frac{Rp. 270.661.496.806 - Rp. 321.801.875.219}{Rp. 321.801.875.219} \times 100\% = -15\%$

2015	$\frac{Rp. 350.425.808.794 - Rp. 270.661.496.806}{Rp. 270.661.496.806} \times 100\% = 29\%$
2016	$\frac{Rp. 339.606.328.085 - Rp. 350.425.808.794}{Rp. 350.425.808.794} \times 100\% = -3\%$
2017	$\frac{Rp. 345.666.463.773 - Rp. 339.606.328.085}{Rp. 339.606.328.085} \times 100\% = 1\%$

Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Laporan Keuangan IPDN Jatinangor

(2019)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 belanja tertinggi IPDN Jatinangor terjadi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 29% dan pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar -15%.

4.2 Pembahasan Penelitian

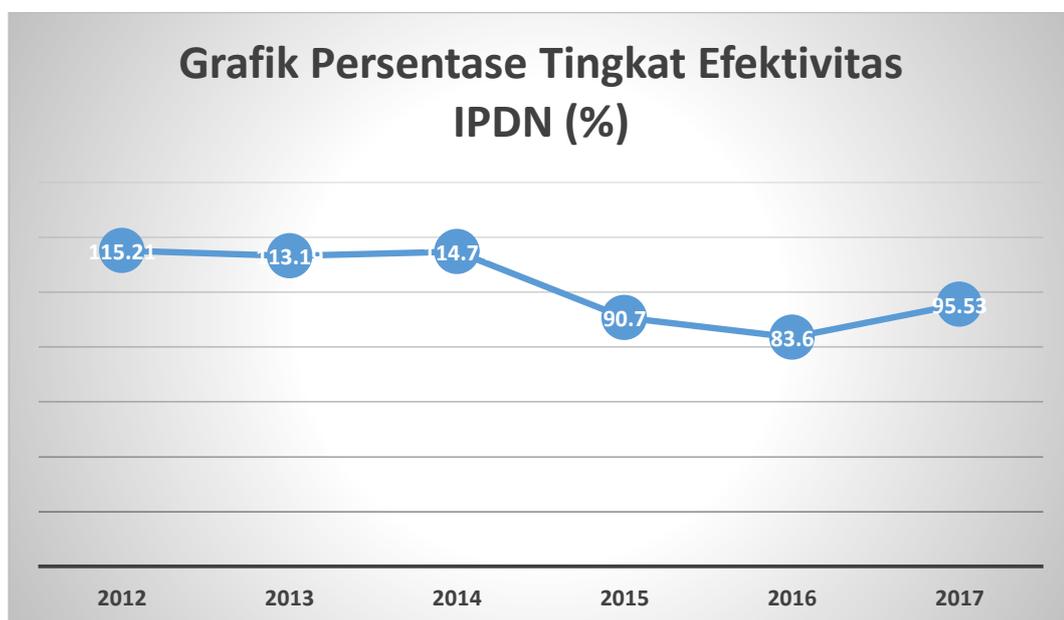
4.2.1 Pembahasan Kinerja Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Pembahasan kinerja keuangan ini dilakukan dengan menganalisis hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan alat ukur berupa rasio, tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab peningkatan serta penurunan kinerja keuangan pada Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) Jatinangor selama periode 2012-2017. Pembahasan ini meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio likuiditas (*Current Ratio* dan *Quick Ratio*), rasio solvabilitas (*Debt to Asset Ratio & Debt to Equity Ratio*) dan rasio kemandirian. Berikut pembahasan mengenai rasio-rasio dalam penelitian ini :

4.2.1.1 Pembahasan Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas telah didapatkan hasil bahwa pada tahun 2012 rasio efektivitas IPDN adalah sebesar 115,21%, pada tahun 2013 sebesar 113,19%, pada tahun 2014 sebesar 114,79%, pada tahun 2015 90,7%, pada tahun 2016 sebesar 83,60% dan pada tahun 2017 sebesar 95,53%.

Dengan kriteria sangat efektif hanya terjadi pada tahun 2012, 2013, dan 2014 saja, kemudian dengan kriteria cukup efektif hanya terjadi pada tahun 2015 dan 2017, sedangkan pada tahun 2016 rasio efektivitas berada pada kriteria yang kurang efektif. Dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai pertumbuhan dari rasio efektivitas sendiri maka dibutuhkan suatu grafik untuk melihat pertumbuhan dari rasio efektivitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, grafik tersebut akan digambarkan melalui gambar 4.1 sebagai berikut



Gambar 4.1 Grafik Persentase Tingkat Efektivitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2012, 2013, dan 2014 rasio efektivitas IPDN berada pada kriteria yang sangat efektif, tetapi Gambar 4.1 memberikan gambaran mengenai penurunan tingkat efektivitas yang terjadi di tahun 2013 sebesar 2,02%, yang artinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor tidak dapat merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor memperoleh pendapatan dari Pemerintah sehingga jika terjadi suatu permasalahan yang terjadi atau pembangunan yang sedang dilakukan maka akan berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan oleh IPDN khususnya pada sektor pendidikan. Pada tahun 2013 Jika dilihat dari permasalahan dunia pendidikan di Indonesia, tahun tersebut bertepatan dengan diberlakukannya kurikulum baru untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, sehingga hal ini menyebabkan pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penerapan kurikulum baru tersebut. Menjelang diberlakukannya kurikulum 2013 akan diberikan pelatihan secara bertahap kepada para guru dan pengawas untuk menyerap materi kurikulum 2013 (Kompas online, 13 Februari 2013).

Dengan adanya penerapan kurikulum baru tersebut maka otomatis berpengaruh pada pendapatan yang dapat direalisasikan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari Pemerintah, karena Pemerintah Pusat sedang menitik beratkan fokusnya pada penetapan kurikulum baru tersebut sehingga anggaran untuk pos pendidikan lebih mengarah pada pemberian pelatihan kepada para guru dan pengawas di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor kembali

mengalami peningkatan sebesar 1,55%, hal ini dipicu oleh adanya peningkatan pengeluaran rutin sebesar 11%.

Rasio efektivitas kembali mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2015 sebesar 24,04%, lalu diikuti dengan tahun 2016 yang menurun lagi sebesar 7,1%, tahun 2016 ini merupakan tingkat rasio efektivitas terendah yang pernah dicapai IPDN selama periode 2012-2017. Pada tahun 2015 dan 2016 dunia pendidikan di Indonesia sedang melakukan pembangunan khususnya pada tingkat SD, SMP, dan SMA. “Sesuai arahan Presiden, target di sektor pendidikan kita bukan sekedar pemerataan akses pendidikan, tapi juga pemerataan yang berkualitas. Kita terus lakukan upaya-upaya untuk mempercepat hal tersebut (detik.com, 17 Agustus 2017)”. Sejak tahun 2015 Indonesia sudah menerapkan Program Indonesia Pintar (PIP), Program ini direalisasikan ke dalam bentuk sebuah kartu yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka yang mendapatkan KIP akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Pada tahun 2015 program ini telah membantu lebih dari 17,9 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia.

Dan pada tahun 2015 juga telah diterapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tingkat SMP dan SMA yang telah dijalankan pada 554 sekolah di Indonesia dengan adanya penerapan ini maka mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah untuk pembelian komputer guna menunjang pelaksanaan program UNBK. Sehingga hal ini yang berpengaruh terhadap menurunnya rasio efektivitas atau pengrealisasian pendapatan yang dicapai oleh IPDN artinya pemerintah tidak dapat memenuhi anggaran yang

diajukan oleh IPDN kepada pemerintah pusat karena pemerintah sedang berfokus pada pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun 2016 jumlah penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah 19,2 juta yang artinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,3 juta. Serta telah terjadi peningkatan secara drastis pada sekolah yang mulai menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari 554 sekolah menjadi 4.381 sekolah, sehingga menyebabkan pemerintah untuk terus menyalurkan dana bantuan kepada sekolah dan pihak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan adanya peningkatan tersebut, otomatis mempengaruhi pendapatan yang dapat direalisasikan oleh IPDN Jatinangor karena pendapatan yang diperoleh oleh IPDN berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

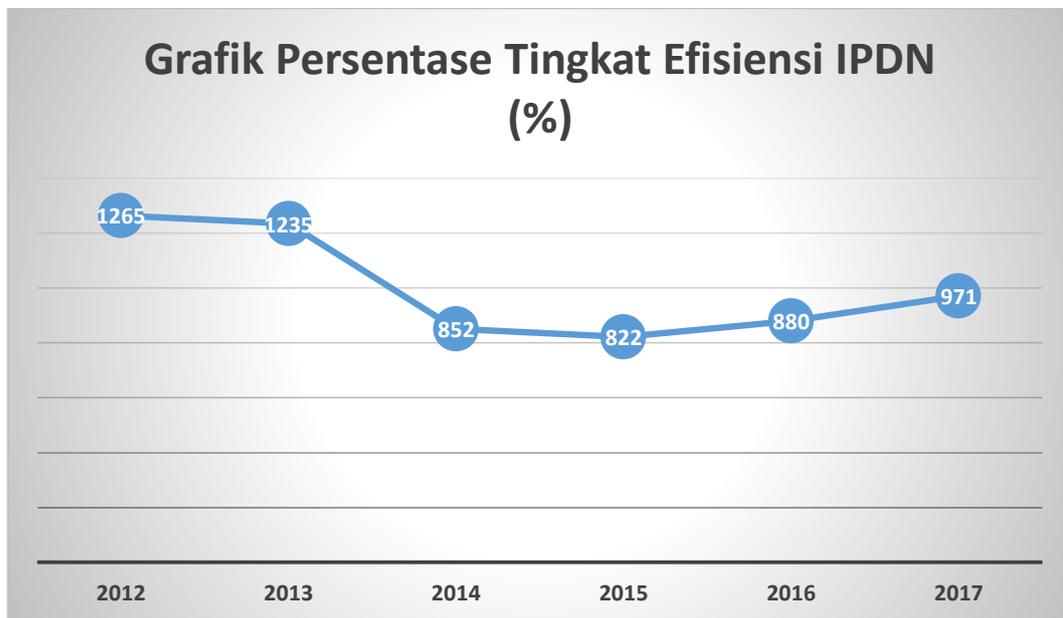
Pada tahun 2017 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dapat meningkat kembali rasio efektivitas pada kriteria cukup efektif dengan peningkatan sebesar 11,93% yang artinya IPDN mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan kepada pemerintah, karena pada tahun 2017 target pendapatan yang ditetapkan oleh IPDN Jatinangor berkurang dari tahun sebelumnya, sehingga pemerintah pusat dapat memenuhi target yang ditetapkan tersebut.

4.2.1.2 Pembahasan Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, selama tahun 2012 hingga 2017 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor belum pernah mencapai kriteria efisien karena berdasarkan hasil perhitungan tahun 2012-2017

persentase yang didapatkan selalu melebihi dari 100%. Berdasarkan standar kriteria menyatakan bahwa semakin kecil rasio maka semakin efisien.

Tetapi dalam penelitian ini akan tetap dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perkembangan rasio efisiensi atau belanja rutin yang dilakukan oleh IPDN dengan menggunakan realisasi pendapatan yang diterima dari Pemerintah sehingga perlu adanya grafik untuk mengetahui perkembangan tersebut dan grafik tersebut akan dituangkan melalui gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Grafik Persentase Tingkat Efisiensi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kondisi rasio efisiensi IPDN Jatinangor dari tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi serta terjadi penurunan secara drastis pada tahun 2014, peningkatan serta penurunan rasio efisiensi IPDN Jatinangor periode 2012-2017 disebabkan oleh :

1. Penurunan rasio efisiensi pada tahun 2013 disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan dari pemerintah sebesar 20%, meskipun belanja rutin ikut meningkat sebesar 17%. Tetapi lebih besar peningkatan terhadap pendapatan dibandingkan belanja rutin.
2. Penurunan yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara drastis sebesar 61% sedangkan belanja rutin hanya meningkat sebesar 11%.
3. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar 40% sedangkan belanja rutin meningkat sebesar 35%.
4. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh meningkatnya belanja rutin sebesar 17% sedangkan pendapatan hanya meningkat sebesar 9%.
5. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya pendapatan sebesar 11%.

Pada tahun 2012 dan 2013 rasio efisiensi berada pada titik tertinggi yang artinya IPDN Jatinangor sering melakukan belanja rutin, jika dilihat dari kejadian yang terjadi di IPDN, pada tahun tersebut bertepatan dengan dibukanya program Doktor Ilmu Pemerintahan, dengan adanya program tersebut maka akan adanya penambahan jumlah dosen pada program Doktor dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap belanja pegawai atau belanja rutin.

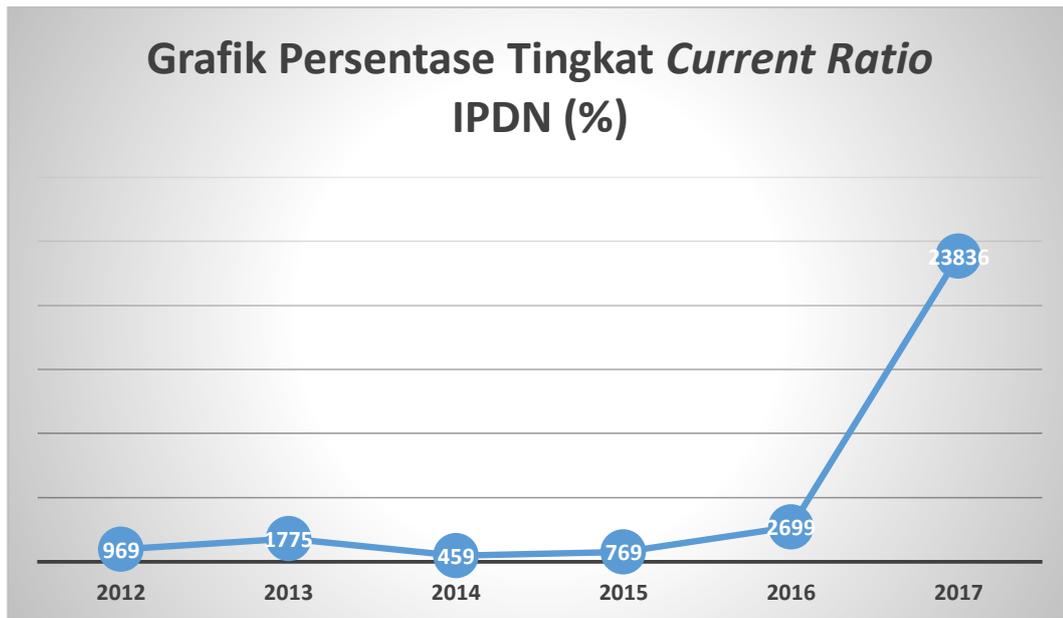
Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada belanja rutin IPDN Jatinangor sebagian besar disebabkan oleh meningkat serta menurunnya jumlah pegawai yang ada.

4.2.1.3 Pembahasan Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau pada saat ditagih, terdapat 2 rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio lancar dan rasio cepat.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar (Rahmawati dkk, 2017). Dengan kata lain seberapa besar aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, standar untuk *current ratio* minimal 200% (Dewi, 2017). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, tingkat *current ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari tahun 2012-2017 berada pada kriteria sangat baik, tetapi dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai pertumbuhannya serta penyebab dari pertumbuhan tersebut, maka diperlukan suatu grafik untuk mengetahui pertumbuhan dari *current ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017.



Gambar 4.3 Grafik Persentase Tingkat *Current Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kondisi *current ratio* IPDN Jatinangor dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi serta terjadi peningkatan secara drastis pada tahun 2017. Peningkatan serta penurunan *current ratio* IPDN Jatinangor dari tahun 2012-2017 disebabkan oleh :

- a. Peningkatan *current ratio* pada tahun 2013 disebabkan oleh adanya peningkatan piutang sebesar 28% dari tahun sebelumnya, serta adanya peningkatan persediaan sebesar 20% dari tahun sebelumnya.
- b. Penurunan *current ratio* pada tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya persediaan sebesar 2,6% dan peningkatan piutang tak tertagih sebesar 4.328%. piutang tak tertagih merupakan piutang yang dinilai tidak lagi dapat ditagih atau sering disebut *write off* (penghapusan piutang). peningkatan piutang tak tertagih disebabkan oleh adanya mahasiswa

pascasarjana yang aktif namun tidak menyelesaikan studi sampai akhir dan terbengkalai selama beberapa semester sehingga tidak membayar uang semester.

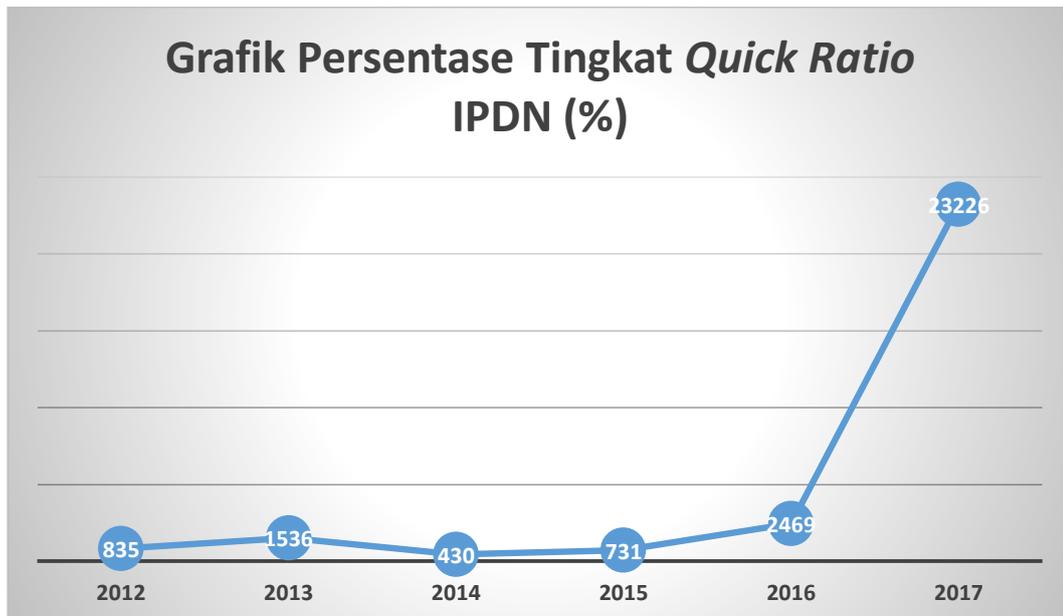
- c. Peningkatan *current ratio* pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 73% serta meningkatnya persediaan sebesar 15%.
- d. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 yang disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 49%, menurunnya piutang tak tertagih sebesar 114% serta menurunnya utang lancar sebesar 59%.
- e. Terjadi peningkatan *current ratio* secara drastis pada tahun 2017 hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 20% , kas sebesar 447%, dan persediaan sebesar 77%, selain itu adanya penurunan utang lancar sebesar 85%.

Peningkatan piutang sebagian besar terjadi karena meningkatnya jumlah kuota praja (mahasiswa) pada setiap Provinsi sehingga kontribusi daerah yang berasal dari APBD meningkat, tetapi kontribusi tersebut belum disetorkan pada pihak IPDN Jatinangor. Serta peningkatan persediaan dan kas terjadi karena adanya peningkatan untuk honor mengajar dan menguji, serta jika terjadinya kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan dana operasional lebih banyak seperti yang terjadi pada tahun 2013, 2015 dan 2017 persediaan meningkat karena adanya kegiatan penting IPDN yang membutuhkan dana operasional lebih banyak. Kegiatan penting tersebut adalah adanya wisuda pamong praja IPDN Jatinangor yang dihadiri oleh Presiden sehingga membutuhkan personel lebih banyak untuk penjagaan lebih ketat selama berlangsungnya kegiatan wisuda tersebut.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid (Rakhmawati dkk, 2017).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, tingkat *quick ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari tahun 2012-2017 berada pada kriteria sangat baik, tetapi dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai laju pertumbuhannya serta penyebab dari pertumbuhan tersebut.



Gambar 4.4 Grafik Persentase Tingkat *Quick Ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa kondisi *quick ratio* IPDN Jatinangor dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi serta terjadi

peningkatan secara drastis pada tahun 2017, peningkatan serta penurunan *quick ratio* IPDN Jatinangor dari tahun 2012-2017 disebabkan oleh :

- a. Peningkatan *quick ratio* pada tahun 2013 disebabkan oleh adanya peningkatan piutang sebesar 28% dari tahun sebelumnya.
- b. Penurunan *quick ratio* pada tahun 2014 disebabkan oleh adanya peningkatan piutang tak tertagih sebesar 4.328%. piutang tak tertagih merupakan piutang yang dinilai tidak lagi dapat ditagih atau sering disebut *write off* (penghapusan piutang). Peningkatan piutang tak tertagih disebabkan oleh adanya mahasiswa pascasarjana yang aktif namun tidak menyelesaikan studi sampai akhir dan terbengkalai selama beberapa semester sehingga tidak membayar uang semester.
- c. Peningkatan *quick ratio* pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 73%.
- d. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 yang disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 49%, menurunnya piutang tak tertagih sebesar 114% serta menurunnya utang lancar sebesar 59%.
- e. Terjadi peningkatan *quick ratio* secara drastis pada tahun 2017 hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang sebesar 20%, kas sebesar 447%.

Peningkatan piutang sebagian besar terjadi karena meningkatnya jumlah kuota praja (mahasiswa) pada setiap Provinsi sehingga kontribusi daerah yang berasal dari APBD meningkat, tetapi kontribusi tersebut belum disetorkan pada pihak IPDN Jatinangor.

4.2.1.4 Pembahasan Rasio Solvabilitas

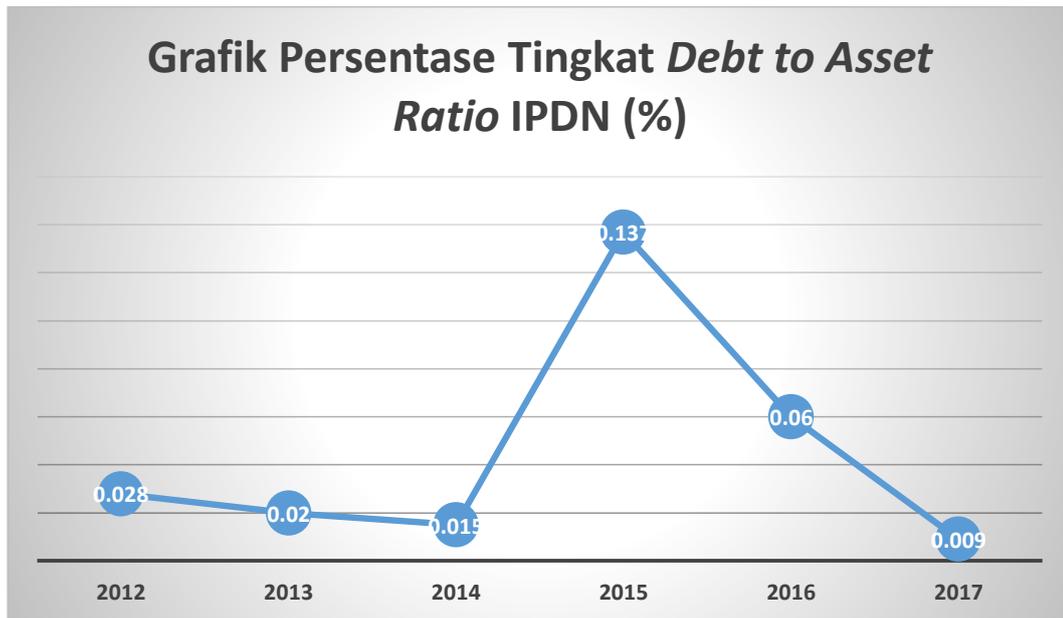
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan/dilikuidasi, terdapat 2 jenis rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*.

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang, standar pengukuran rata-rata adalah 35% (Widiyanti, 2014).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, tingkat *debt to asset ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari tahun 2012-2017 berada pada kriteria sangat baik karena tidak melebihi standar yaitu 35% bahkan hasilnya tidak melebihi 1% yang artinya aktiva IPDN sangat rendah dibiayai oleh utang, tetapi dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai laju pertumbuhannya serta penyebab dari pertumbuhan tersebut.



Gambar 4.5 Grafik Persentase Tingkat *Debt to Asset Ratio* (DAR) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.5 telah terjadi penurunan tingkat rasio dari tahun 2013-2014 dan mengalami peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2015 kemudian menurun kembali pada tahun 2016 dan 2017. Berikut hal yang menyebabkan peningkatan dan penurunan *debt to asset ratio* selama periode 2012-2017 :

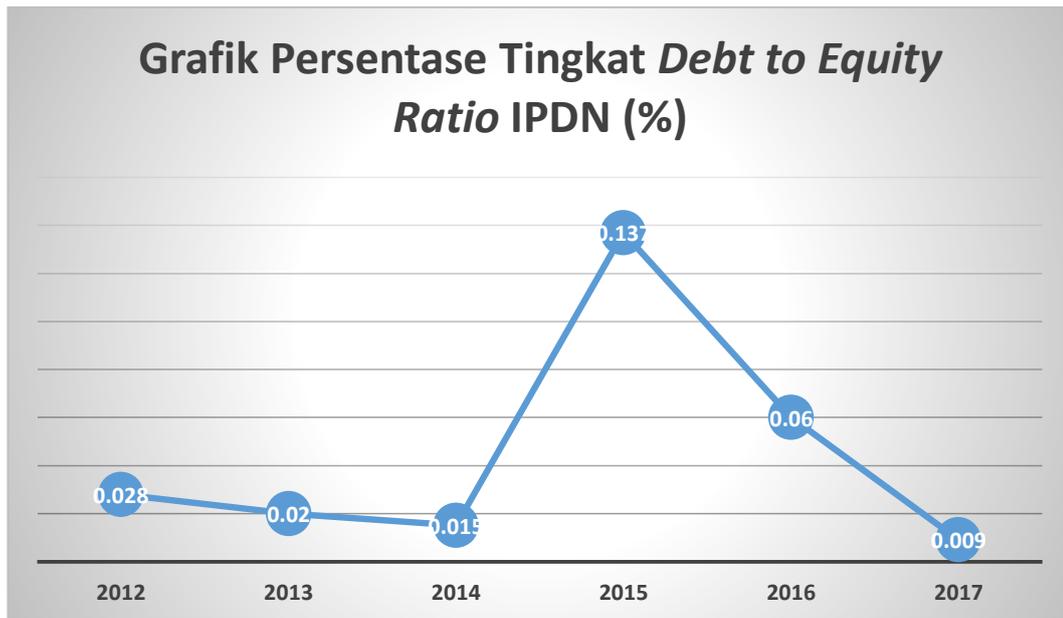
- a. Penurunan *debt to asset ratio* pada tahun 2013 disebabkan oleh menurunnya jumlah asset sebesar 6,9% serta menurunnya jumlah utang sebesar 32%.
- b. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2014 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah utang sebesar 20%.

- c. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan *debt to asset ratio* yang sangat drastis hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya total asset sebesar 6%, serta meningkatnya total utang sebesar 780%. Hal yang memicu meningkatnya utang menjadi sangat tinggi pada tahun 2015 adalah menurunnya realisasi pendapatan dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan mnurunnya rasio efektivitas yang cukup drastis karena pada saat itu anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan lebih dicurahkan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.
- d. Penurunan pada tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya jumlah asset sebesar 10% serta menurunnya jumlah utang sebesar 59%.
- e. Pada tahun 2017 *debt to asset ratio* mengalami penurunan kembali yang disebabkan oleh menurunnya jumlah asset sebesar 0,52% serta menurunnya jumlah utang sebesar 85%.

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, standar umum rata-rata sebesar 90%. Bila di atas rata-rata perusahaan dianggap kurang baik (Widiyanti, 2014).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, tingkat *debt to equity ratio* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dari tahun 2012-2017 berada pada kriteria sangat baik karenaP tidak melebihi standar yaitu 66% bahkan hasilnya tidak melebihi 1% yang artinya aktiva IPDN sangat rendah dibiayai oleh utang, tetapi dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai laju pertumbuhannya serta penyebab dari pertumbuhan tersebut.



Gambar 4.6 Grafik Persentase Tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017
Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.6 telah terjadi penurunan tingkat rasio dari tahun 2013-2014 dan mengalami peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2015 kemudian menurun kembali pada tahun 2016 dan 2017. Berikut hal yang menyebabkan peningkatan dan penurunan *debt to equity ratio* selama periode 2012-2017 :

- a. Penurunan yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh menurunnya jumlah utang sebesar 32%.
- b. Penurunan yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya jumlah utang sebesar 20%.
- c. Peningkatan rasio yang sangat drastis pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya total utang sebesar 780%. Hal yang memicu meningkatnya utang menjadi sangat tinggi pada tahun 2015 adalah menurunnya realisasi

pendapatan dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan menurunnya rasio efektivitas yang cukup drastis karena pada saat itu anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan lebih dicurahkan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

- d. Penurunan pada tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya jumlah utang sebesar 59%.
- e. Penurunan pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya jumlah utang sebesar 85%.

4.2.2 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Pembahasan analisis pertumbuhan ini dilakukan dengan menganalisis hasil dari perhitungan yang telah dilakukan berupa perhitungan pada pertumbuhan pendapatan dan belanja, tujuannya untuk mengetahui penyebab meningkat serta menurunnya pendapatan yang diperoleh dan juga belanja yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor selama periode 2012-2017. Pembahasan ini meliputi analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja sebagai berikut :

4.2.2.1 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2006) yang dikutip oleh Mirza (2012) analisis pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Berdasarkan

pernyataan tersebut maka diperlukan suatu grafik untuk mengetahui apakah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau sebaliknya.



Gambar 4.7 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada tahun 2014 saja, sedangkan pada tahun berikutnya pertumbuhan pendapatan terus menurun sampai mencapai titik minus, berikut hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan penurunan pada pertumbuhan pendapatan IPDN Jatinangor :

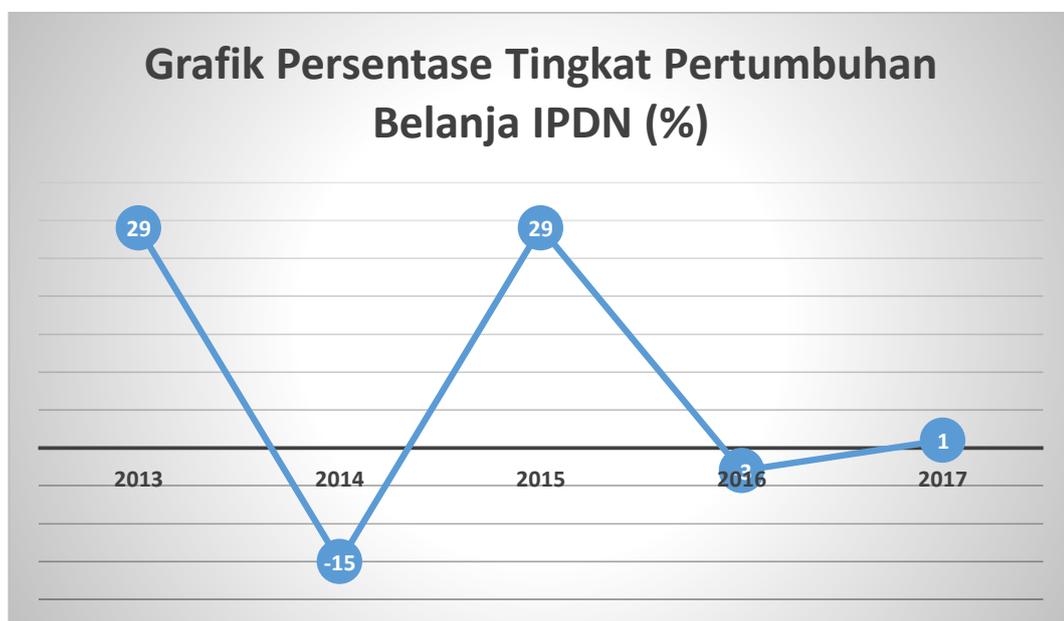
1. Pada tahun 2014 pertumbuhan pendapatan meningkat drastis sebesar 41%, meningkatnya pendapatan disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang dapat direalisasikan oleh IPDN dari target yang sudah ditetapkan meningkat sebesar 1,55%.
2. Pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatan menurun sebesar 21% yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang dapat direalisasikan oleh IPDN

dari target yang sudah ditetapkan sebesar 24,04%. Hal yang memicu penurunan pendapatan dari Pemerintah pada tahun 2015 karena dunia pendidikan di Indonesia sedang melakukan pembangunan khususnya pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

3. Pada tahun 2016 pertumbuhan pendapatan menurun sebesar 31% yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang dapat direalisasikan oleh IPDN dari target yang sudah ditetapkan sebesar 7,1%. Alasan yang membuat terus menurunnya pendapatan IPDN karena pemerintah pusat sedang fokus melakukan pembangunan pada sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta diterapkannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMP dan SMA.
4. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan berada pada titik minus, karena meskipun realisasi pendapatan mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi pendapatan IPDN menurun dari tahun sebelumnya sebesar 11%. Hal yang menyebabkan pendapatan dari pemerintah terus menurun karena pemerintah pusat sedang mencurahkan anggaran untuk sektor pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dibuktikan dengan, “Pemerintah telah membantu merevitalisasi 49 sekolah dan membangun 114 Sekolah Garis Depan (SGD) baru di berbagai titik, selain itu sepanjang 2017 ini Kemdikbud membantu penyediaan 11 sekolah untuk memberikan layanan khusus pada peserta didik berkebutuhan khusus (detik.com, 17 Agustus 2017)”.

4.2.2.2 Pembahasan Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik, alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan suatu grafik untuk mengetahui apakah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mengalami pertumbuhan belanja secara positif atau sebaliknya.



Gambar 4.8 Grafik Persentase Tingkat Pertumbuhan Belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Periode 2012-2017

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan Gambar 4.8 peningkatan serta penurunan yang terjadi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mengalami fluktuasi. Berikut hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan penurunan pada pertumbuhan belanja IPDN Jatinangor :

1. Penurunan pertumbuhan belanja pada tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya belanja modal sebesar 72%.
2. Peningkatan pertumbuhan belanja pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai sebesar 35% dan meningkatnya belanja barang sebesar 33%.
3. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2016 yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang sebesar 6% dan menurunnya belanja modal sebesar 87%.
4. Pertumbuhan belanja mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 yang disebabkan oleh meningkatnya belanja barang sebesar 4%.

4.2.3 Pengukuran Performa Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Pengukuran performa dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor terbilang baik atau tidak serta untuk mengetahui mengenai pertumbuhan pendapatan dan belanja pada IPDN Jatinangor, apakah mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif. Selain itu, pengukuran performa ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi IPDN Jatinangor dalam mengelola keuangan untuk tahun selanjutnya. Berikut pengukuran performa yang dilakukan dalam penelitian ini :

4.2.3.1 Pengukuran Performa Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Belanja

Dalam penelitian ini kinerja keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor diukur dengan menggunakan rasio, terdapat 4 rasio yang diambil

dalam penelitian ini yang diantaranya adalah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio likuiditas, dan juga rasio solvabilitas sedangkan analisis pertumbuhan akan diukur melalui pertumbuhan pendapatan dan belanja. Pengukuran berdasarkan kinerja keuangan dan analisis pertumbuhan pendapatan belanja tersebut akan dituangkan melalui tabel 4.13 :

Tabel 4.13
Pengukuran Performa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jatinangor Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Analisis Pertumbuhan
Pendapatan Belanja Periode 2012-2017

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan adanya peningkatan serta penurunan yang drastis sehingga akan diulas kembali mengenai hal tersebut berserta dengan pengukuran performa pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

1. Rasio Efektivitas

Berdasarkan rasio efektivitas performa IPDN Jatinangor tergolong cukup baik karena selama periode 2012-2017 Instansi mendapatkan persentase dengan kriteria kurang efektif hanya terjadi pada tahun 2016 saja sebesar 83,6%, hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan pada dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada tingkat SD, SMP, SMA dengan diberlakukannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu supaya dapat bersekolah secara gratis serta diberlakukannya sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMP dan SMA.

2. Rasio Efisiensi

Dalam penelitian ini tidak terpacu pada hasil penelitian yang dilakukan karena sudah terlihat jelas dalam laporan keuangan bahwa belanja rutin yang dilakukan oleh IPDN Jatinangor sangat tidak efisien atau tidak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya, akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengarah terhadap perkembangan/ pertumbuhan rasio efisiensi yang terjadi pada IPDN Jatinangor. Berdasarkan perkembangannya rasio efisiensi berada pada titik tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah dosen karena IPDN telah membuka program Doktor Ilmu Pemerintahan sehingga mempengaruhi belanja rutin yang dilakukan. Sedangkan sebagian besar peningkatan dan penurunan yang terjadi disebabkan oleh bertambah dan

berkurangnya jumlah pegawai di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

3. Rasio Likuiditas

Berdasarkan rasio likuiditas dengan perhitungan menggunakan *current ratio* dan *quick ratio*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor menunjukkan kondisi yang likuid atau baik yang artinya IPDN Jatinangor mampu membayar segala utang jangka pendeknya. Tetapi jika dilihat dari perkembangannya IPDN Jatinangor tetap mengalami penurunan dan peningkatan pada asset lancar (kas, piutang, piutang tak tertagih, persediaan) dan utang lancar (utang jangka pendek). Peningkatan pada piutang sebagian besar diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kuota praja (mahasiswa) pada setiap Provinsi sehingga kontribusi daerah yang berasal dari APBD meningkat, tetapi kontribusi tersebut belum disetorkan pada pihak IPDN. Sedangkan piutang tak tertagih disebabkan oleh adanya mahasiswa pascasarjana yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga akhir. Dan persediaan meningkat diakibatkan oleh adanya kegiatan tertentu sehingga memerlukan dana yang lebih besar.

4. Rasio Solvabilitas

Berdasarkan rasio solvabilitas dengan perhitungan menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor menunjukkan kondisi yang *solvable* atau baik yang artinya total asset dan modal yang dimiliki oleh IPDN Jatinangor tidak banyak dibiayai oleh utang. Tetapi jika dilihat dari perkembangannya pada tahun 2015 DAR (*debt to asset ratio*) dan DER (*debt to equity ratio*) mengalami peningkatan yang

sangat drastis dan menjadi titik rasio tertinggi yang dialami oleh IPDN Jatinangor yang artinya terdapat sebagian asset dan modal IPDN yang dibiayai oleh utang. Yang memicu hal tersebut terjadi adalah menurunnya realisasi pendapatan dari pemerintah dengan cukup drastis sehingga mendorong IPDN Jatinangor untuk melakukan utang pada pihak ketiga.

5. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor terus mengalami penurunan sejak tahun 2015-2017. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan pada dunia pendidikan Indonesia khususnya pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Pembangunan tersebut mempengaruhi pertumbuhan pendapatan IPDN karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh berasal dari pemerintah.

6. Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mengalami fluktuasi dalam melakukan belanjanya, baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai meningkat sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah pegawai di lingkungan IPDN Jatinangor, belanja barang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah praja di IPDN Jatinangor. Dan belanja modal meningkat disebabkan oleh adanya pembangunan fasilitas prasarana di lingkungan IPDN Jatinangor.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tooy, dkk (2016) mengenai “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG)

Kabupaten Minahasa Utara” bahwa Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG selama tahun anggaran 2011-2015 rata-rata berada di tingkat 90%-100% artinya laporan realisasi anggaran kurang efisien atau tidak efisien, sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara selama tahun anggaran 2011-2015 pada tingkat 100% yaitu sangat efektif.

Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Rakhmawati, dkk (2017) mengenai “Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Guna Mengukur Kinerja Keuangan PT. Vevo Indah Pratama Gresik” bahwa Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat likuiditasnya yaitu *current ratio* mengalami kenaikan setiap tahun, *quick ratio* mengalami kondisi yang kurang baik sementara *cash rasionya* mengalami fluktuasi. Pada tingkat solvabilitasnya yaitu DAR mengalami kondisi solvable dan pada *net worth to debt rasionya* dalam keadaan insolvable. Pada tingkat profitabilitasnya yaitu GPM dan NPM mengalami fluktuasi serta pada ROA mengalami penurunan dan pada ROE dalam kondisi fluktuasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan beberapa hal-hal berikut ini :

1. Kinerja keuangan IPDN Jatinangor diukur menggunakan 4 jenis rasio sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan rasio efektivitas, IPDN Jatinangor tergolong cukup baik karena selama periode 2012-2017 hasil rasio dengan kriteria kurang efektif hanya terjadi pada tahun 2016 saja yaitu 83,6%.
 - b. Berdasarkan rasio efisiensi, IPDN Jatinangor termasuk ke dalam kriteria tidak efisien karena hasil rasio selalu melebihi angka 100% artinya pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima IPDN dari Pemerintah .
 - c. Berdasarkan rasio likuiditas dengan menggunakan *current ratio* dan *quick ratio*, IPDN Jatinangor berada pada kriteria yang sangat baik atau likuid.
 - d. Berdasarkan rasio solvabilitas dengan menggunakan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, IPDN Jatinangor berada pada kriteria yang sangat baik atau solvable.
2. Pertumbuhan pendapatan IPDN Jatinagor hanya mengalami peningkatan pada tahun 2014 saja sebesar 61% sedangkan untuk tahun selanjutnya pertumbuhan pendapatan terus mengalami penurunan hingga titik minus. Kemudian pada pertumbuhan belanja IPDN Jatinangor selalu fluktuatif artinya belanja yang

dilakukan oleh IPDN tidak pernah stabil baik dari belanja pegawai, belanja modal serta belanja barangnya.

3. Berdasarkan pengukuran performa melalui kinerja keuangan, IPDN Jatinangor telah melakukan prinsip efektivitas dengan cukup baik serta mengelola kewajibannya dengan baik juga. Tetapi IPDN Jatinangor belum bisa melaksanakan prinsip efisiensi dan ekonomis dalam melaksanakan belanja rutinnya sesuai dengan prinsip manajemen sektor publik. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, IPDN Jatinangor mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun sejak tahun 2015-2017. Sedangkan analisis pertumbuhan belanja pada IPDN Jatinangor mengalami pertumbuhan yang tidak stabil atau berfluktuatif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kinerja keuangannya IPDN Jatinangor diukur menggunakan 4 rasio, sehingga terdapat 4 saran yang mewakili dari masing-masing rasio :
 - a. Rasio Efektivitas : Rasio efektivitas yang didapatkan oleh IPDN rata-rata berada pada kriteria efektif, sehingga IPDN Jatinangor diharapkan dapat mempertahankan persentase tersebut atau bahkan meningkatkannya.
 - b. Rasio Efisiensi : Hasil yang didapatkan telah menunjukkan bahwa rasio efisiensi IPDN Jatinangor berada pada kriteria tidak efisien, sehingga pihak instansi perlu menekan belanja rutinnya agar tidak melebihi realisasi pendapatan yang diterima.

- c. Rasio Likuiditas : Berdasarkan hasil penelitian terhadap rasio likuiditas telah didapatkan hasil bahwa rasio ini berada pada keadaan yang sangat likuid, artinya IPDN sangat mampu membayar utang lancar dengan menggunakan asset lancarnya, sehingga IPDN harus terus mempertahankan keadaan tersebut.
 - d. Rasio Solvabilitas : Rasio solvabilitas yang didapatkan oleh IPDN Jatinangor berada pada keadaan yang sangat baik atau solvable, artinya asset serta modal milik IPDN Jatinangor yang dibiayai oleh utang sangat kecil. Sehingga IPDN Jatinangor perlu mempertahankan keadaan tersebut atau bahkan meningkatkannya.
2. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, sebaiknya IPDN Jatinangor harus terus berusaha dalam meningkatkan pendapatannya supaya segala pengeluaran yang dilakukan dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, sebaiknya IPDN Jatinangor dapat lebih menstabilkan kegiatan belanjanya baik dari belanja pegawai (rutin), belanja barang, dan belanja modalnya, sehingga perkembangan yang didapatkan tidak terlalu berfluktuatif.
 3. Berdasarkan performa kinerja keuangannya, terdapat 2 rasio yang menunjukkan hasil dengan kriteria yang tidak baik yaitu rasio efisiensi dan rasio kemandirian, sebaiknya IPDN Jatinangor melakukan evaluasi dalam efisiensi belanja rutin yang dilakukan. Instansi harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran belanja yang diberikan pemerintah dengan menekan belanja rutin, sehingga membeli keperluan yang dianggap penting saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. (2017). Penggunaan Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, 102-112.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2013/02/13/16430169/Kurikulum.2013.Diberlakukan.secara.Bertahap>. Diunduh tanggal 21 Desember 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3603275/jurus-mendikbud-percepat-pendidikan-yang-merata-dan-berkualitas>. Diunduh tanggal 21 Desember 2018.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pendoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Mirza, R.A. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol. 4, No. 1, 55-66.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi Nirlaba.

Rakhmawati, A.N., Tri, L., dan Siti, R. (2017). Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Guna Mengukur Kinerja Keuangan PT. Vevo Indah Pratama Gresik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3, No. 3, 94-107.

Ramadhani, F.R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14, No. 1, 86-98.

Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

South, N., Jantje, T., dan Sintje, R. (2016). Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 1, 613-622.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tooy, R.G., David, P.E.S., dan Lidia, M. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 4, 659-671.

Widiyanti, M. (2014). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Holcim Indonesia, Tbk dan PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*. Vol. 11, No. 1, 31-44.

